

Judul : Pimpinan DPR segera tindak lanjuti putusan MKD
Tanggal : Jumat, 07 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

KODE ETIK

Pimpinan DPR Segera Tindak Lanjuti Putusan MKD

JAKARTA, KOMPAS – Meski menuai kritik publik, pimpinan DPR menghormati putusan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD terhadap lima anggota DPR yang dinonaktifkan partai politik buntut demonstrasi, akhir Agustus. Pimpinan DPR juga meminta semua pihak menghormati keputusan MKD DPR tersebut.

Dua di antara lima anggota DPR yang dinilai tidak melanggar kode etik, yakni Adies Kadir dan Surya Utama atau Uya Kuya, akan segera diaktifkan kembali sebagai anggota DPR dalam rapat paripurna.

Ketua DPR Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/11/2025), mengatakan, pimpinan DPR menghormati dan akan segera menindaklanjuti keputusan MKD yang menyatakan tiga anggota melanggar kode etik dan dua anggota lainnya tidak melanggar etik.

"Ya, kita hormati yang menjadi keputusan MKD dan akan kita tindak lanjuti apa yang menjadi keputusan tersebut,"

ujar Puan.

Pada Rabu (5/11), MKD telah memutuskan tiga anggota DPR, yakni Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach, terbukti melanggar kode etik DPR. Sebagai sanksinya, mereka dinonaktifkan sebagai anggota DPR antara tiga sampai enam bulan. Adapun dua anggota DPR lainnya, yakni Adies Kadir dan Uya Kuya, dinyatakan tak bersalah sehingga lolos dari sanksi etik MKD.

Adies Kadir dan Uya Kuya yang dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik diputuskan untuk segera diaktifkan kembali sebagai anggota DPR, termasuk memulihkan posisi Wakil Ketua DPR yang dijabat Adies Kadir, sejak putusan itu dibacakan. Meski demikian, Adies Kadir diingatkan untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta senantiasa menjaga perilaku.

Sebelumnya, mereka dinonaktifkan oleh partai politik masing-masing sejak 1 September 2025. Penonaktifan mereka buntut unjuk rasa besar-besaran

pada akhir Agustus lalu. Tiap-tiap parpol, saat itu, menilai tindakan atau ucapan mereka menyakiti publik sehingga ujungnya memantik unjuk rasa yang berujung kerusuhan.

Kececewaan publik

Menurut peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, putusan MKD tersebut di luar ekspektasi dan membuat kecewa publik. Sebab, semula publik menaruh harapan MKD untuk bisa memberikan sanksi lebih tegas terhadap kelima anggota DPR tersebut, yakni pemberhentian sebagai anggota DPR.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan, keputusan MKD tersebut telah melalui berbagai pertimbangan. Ia meminta semua pihak menghormati keputusan MKD DPR tersebut.

"Ya, itu, kan, MKD sudah melalui berbagai pertimbangan, ya, untuk mengambil keputusan

itu. Ditanya ke MKD pertimbangannya seperti apa," ujar Cucun.

Terkait pemulihan status Wakil Ketua DPR yang dijabat Adies Kadir, Puan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme yang berlaku.

"Kita lihat dulu kemarin keputusannya seperti apa. Dan, hari ini belum ada agenda apa-apa. Karena itu nanti mungkin saya akan bicara dulu dengan para pimpinan yang lain terkait dengan keputusan MKD yang baru diputuskan," katanya.

Cucun menambahkan, pimpinan DPR sudah menerima surat putusan terhadap kelima anggota DPR itu dari pimpinan MKD. Selanjutnya, pimpinan DPR akan menggelar rapat pimpinan dan Badan Musyawarah DPR untuk menentukan waktu pelaksanaan Rapat Paripurna DPR dengan salah satu agenda mengumumkan pengaktifan kembali status keanggotaan DPR bagi Uya Kuya dan Adies Kadir.

"Belum tahu kapan (rapat pa-

ripurna) harus rapim dan bamus dulu," ujar Cucun.

Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Muhammad Sarmuji mengatakan, pihaknya belum mendapatkan salinan lengkap dari putusan MKD DPR. Meski demikian, dengan melihat amar putusan MKD, bisa diartikan bahwa Adies Kadir akan kembali menempati salah satu unsur pimpinan DPR dari Fraksi Golkar.

"Saya belum dapat salinan lengkapnya keputusan MKD. Akan tetapi, logika hukumnya kemarin Pak Adies nonaktif sebagai pimpinan, kan, karena dinonaktifkan sebagai anggota. Jadi, kalau keanggotaannya aktif, sebagai pimpinan mestinya juga aktif," kata Sarmuji.

Menurut Sarmuji, proses etik di MKD DPR merupakan bagian dari sistem *checks and balances* yang harus dijalankan secara obyektif dan transparan. Putusan MKD telah melewati hasil proses panjang dan mempertimbangkan fakta dan keterangan secara menyeluruh.

(DYT)